

# **PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun  
2023**



Jalan Raya Tlanakan Pamekasan

Pamekasan - Jawa Timur 69371

Telp. 0324322458 Fax. 0324327428

Website : [pa-pamekasan.go.id](http://pa-pamekasan.go.id)

e-mail : [pa\\_pmk126@yahoo.com](mailto:pa_pmk126@yahoo.com)/[pa.pmk126@gmail.com](mailto:pa.pmk126@gmail.com)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Raya Tlanakan Pamekasan**

**Telp. 0324322458 Fax. 0324327428**

**Pamekasan - Jawa Timur 69371**

**Website : [pa-pamekasan.go.id](http://pa-pamekasan.go.id)**

**e-mail : [pa\\_pmk126@yahoo.com](mailto:pa_pmk126@yahoo.com)/[pa.pmk126@gmail.com](mailto:pa.pmk126@gmail.com)**

## KATA PENGANTAR


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II Tahun 2023. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pamekasan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.


Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Pamekasan. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pamekasan, 29 Desember 2023  
Sekretaris



AKHMADI, S.H.  
NIP. 197006091991031001



# DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> .....	xiii
<b>NERACA</b> .....	xiv
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b> .....	xv
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> .....	xvi
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	1
A. PENJELASAN UMUM .....	1
A.1 Dasar Hukum .....	1
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pamekasan.....	2
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	4
A.4 Basis Akuntansi .....	4
A.5 Dasar Pengukuran.....	4
A.6 Kebijakan Akuntansi.....	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	11
B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak .....	11
B.2 Belanja Pegawai .....	13
B.3 Belanja Barang .....	14
B.4 Belanja Modal.....	14
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	15
B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	15
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	18
C.2 Persediaan .....	18
C.3 Tanah.....	20
C.4 Peralatan dan Mesin.....	20
C.5 Peralatan dan Mesin Belum Diregister .....	20
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester II Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. ....	21

C.6 Gedung dan Bangunan.....	21
C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	21
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester II Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan .....	21
C.8 Aset Tetap Lainnya .....	21
C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) .....	21
C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	21
C.16 Aset Tak Berwujud .....	23
C.17 Aset Lain-Lain .....	23
C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	24
C.14 Uang Muka dari KPPN .....	25
C.15 Ekuitas .....	25
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL .....	25
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	25
D.2 Beban Pegawai .....	26
D.3 Beban Persediaan .....	26
D.4 Beban Barang dan Jasa .....	26
D.5 Beban Pemeliharaan .....	26
D.6 Beban Perjalanan Dinas .....	27
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	27
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih .....	27
D.9 Kegiatan Non Operasional.....	27
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	27
E.1 Ekuitas Awal.....	27
E.2 Surplus (Defisit) LO .....	28
E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar .....	28
E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset .....	28
E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan .....	28
E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	28
E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi .....	29
E.3.6 Koreksi Lain-lain .....	29
E.4 Transaksi Antar Entitas.....	29
E.5 Ekuitas Akhir .....	29
F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	30
F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	30

F.3 Rekening Pemerintah .....	30
F.4 Pengungkapan Penting Lain-lain.....	30

# DAFTAR TABEL

Hal

<b><i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan .....</i></b>	<b><i>12</i></b>
<b><i>Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja .....</i></b>	<b><i>122</i></b>
<b><i>Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja .....</i></b>	<b><i>13</i></b>
<b><i>Tabel 4. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai.....</i></b>	<b><i>14</i></b>
<b><i>Tabel 5. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang.....</i></b>	<b><i>144</i></b>
<b><i>Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal .....</i></b>	<b><i>15</i></b>
<b><i>Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....</i></b>	<b><i>155</i></b>
<b><i>Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....</i></b>	<b><i>16</i></b>
<b><i>Tabel 9. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun .....</i></b>	<b><i>177</i></b>
<b><i>Tabel 10. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun .....</i></b>	<b><i>188</i></b>
<b><i>Tabel 11. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun.....</i></b>	<b><i>19</i></b>
<b><i>Tabel 12. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca SAIBA dan SIMAKBMN .....</i></b>	<b><i>200</i></b>
<b><i>Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....</i></b>	<b><i>222</i></b>
<b><i>Tabel 14. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun .....</i></b>	<b><i>223</i></b>
<b><i>Tabel 15. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun.....</i></b>	<b><i>245</i></b>

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pamekasan, 29 Desember 2023  
Kepala Unit Akuntansi Pembantu Anggaran  
Sekretaris Pengadilan Agama Pamekasan



**AKHMADI, S.H.**

NIP. 197006091991031001



# RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan Realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.199.972,00 atau mencapai 325 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 360.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II Tahun 2023 adalah sebesar Rp 5.712.091.729,00 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.761.068.000,00.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Semester II Tahun 2023.

Nilai Aset per Semester II Tahun 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 6.301.540.928,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 327.500,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 6.301.213.428,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 6.301.540.928,00.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Semester II Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.168.812,00, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp 5.150.228.344,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 5.149.059.532,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 160,00 dan Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 5.149.059.372,00).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 5.608.952.543,00, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp 5.149.059.372,00), kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan dan transaksi antar entitas masing-masing senilai Rp 0,00, dan Rp 5.841.647.757,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal Semester II Tahun 2023 adalah senilai Rp 6.301.540.928,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal Semester II Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan Basis Kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan Basis AkruaI.

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER II TAHUN 2023 DAN 2022

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Catata	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>B.1</b>	<b>360.000</b>	<b>1.168.972</b>	<b>325</b>	<b>0</b>
Jumlah Pendapatan		<b>360.000</b>	<b>1.168.972</b>	<b>325</b>	<b>0</b>
Belanja					
Belanja Pegawai	<b>B.2</b>	<b>3.446.557.000</b>	<b>3.415.539.413</b>	<b>99</b>	<b>3.228.287.868</b>
Belanja Barang	<b>B.3</b>	<b>1.623.197.000</b>	<b>1.610.654.572</b>	<b>99</b>	<b>1.556.423.878</b>
Belanja Modal	<b>B.4</b>	<b>991.314.000</b>	<b>685.897.744</b>	<b>99</b>	<b>23.500.000</b>
Jumlah Belanja		<b>5.761.068.000</b>	<b>5.712.091.729</b>	<b>99</b>	<b>4.808.211.746</b>

## NERACA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN  
NERACA  
PER SEMESTER II TAHUN 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (Preparid)	C. 2.	0	206.055
Piutang Bukan pajak	C. 3.	0	0
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (Netto)</b>	<b>C. 4.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Persediaan	C. 5.	327.500	103.800
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>327.500</b>	<b>309.855</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C. 6.	2.447.799.000	2.447.799.000
Peralatan dan Mesin	C. 7.	2.379.953.734	2.146.243.734
Gedung dan Bangunan	C. 8.	4.281.827.744	4.281.827.744
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 9.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.10.	5.704.857	5.704.857
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.11.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12.	( 2.814.041.907)	( 2.567.018.891)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>6.301.213.428</b>	<b>5.628.628.700</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.13.	22.200.000	22.200.000
Akumulasi Penyusutan/Amortasi Aset Lainnya	C.14.	(22.200.000)	(22.200.000)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>6.301.540.928</b>	<b>5.628.938.555</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang untuk pihak ketiga	C.15.	0	19.986.012
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.16.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.17.	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0</b>	<b>19.986.012</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>0</b>	<b>19.986.012</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.18.	6.301.540.928	5.608.952.993
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>		<b>6.301.540.928</b>	<b>5.608.952.543</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>		<b>6.301.540.928</b>	<b>5.628.938.555</b>

**LAPORAN OPERASIONAL**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER II TAHUN 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Desember 2023	30 Desember 2022
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan Operasional</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.168.812	0
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<b>1.168.812</b>	<b>0</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	3.395.997.413	3.236.568.868
Beban Persediaan	D. 3	41.964.382	38.379.850
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.120.512.012	1.092.640.549
Beban Pemeliharaan	D. 5	379.068.021	372604.500
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	68.648.500	46.650.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 8	144.038.016	249.964.726
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 9	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>5.150.228.344</b>	<b>5.036.808.493</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>( 5.149.059.532)</b>	<b>( 5.036.808.493)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D. 10	160	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	D. 11	(5.149.059.532)	(5.036.808.493)
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>		<b>(5.149.059.532)</b>	<b>(5.036.808.493)</b>

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER II TAHUN 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Desember 2023	30 Desember 2022
Ekuitas Awal	E. 1	5.608.952.543	5.556.327.383
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	( 5.149.059.532)	( 5.036.808.493)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E. 2.1		
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Koreksi atas Reklasifikasi	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	5.841.647.757	643.571.261
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 5	692.588.385	161.268.003
Ekuitas Akhir		6.301.540.928	5.717.595.386

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. PENJELASAN UMUM

### *Dasar Hukum*

#### **A.1 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMMK.06/2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2017 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

*Profil dan  
Kebijakan  
Teknis  
Pengadilan  
Agama  
Pamekasan*

## **A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pamekasan**

### **Rencana Strategis Pengadilan Agama Pamekasan**

#### **Visi dan Misi Pengadilan Agama Pamekasan**

Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 adalah sebagai berikut : **"*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*"**.

Penjelasan :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk memperjelas upaya pencapaian Visi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya menurunkan dalam 4 (empat) pilar Misi yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Visi dan Misinya.



## **Tujuan**

Pengadilan Agama Pamekasan bisa menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, apabila :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

## **Sasaran Strategis**

Sasaran strategis Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
- e. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- f. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
- g. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

## **Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengadilan Agama Pamekasan**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2020 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pamekasan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAKBMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan dan Aset Lainnya untuk diperbandingkan dengan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.4 Basis Akuntansi**

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.5 Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

## **A.6 Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-  
LRA*

### **(1) Pendapatan–LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

### **(2) Pendapatan–LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas Pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
  - Pendapatan Persekot Gaji.
  - Pendapatan atas Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.
  - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

*Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

### **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban, terjadinya konsumsi Aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal Neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan Tahunan 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Semester II Tahun 2023 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap :
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

***Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap***

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

***Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud***

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat</b>
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun



- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan.

## **(6) Kewajiban**

### *Kewajiban*

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## **(7) Ekuitas**

### *Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### *Realisasi*

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

### *Pendapatan*

### **B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

### *Negara Bukan*

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2023 (Periode Semester II Tahun 2023) adalah sebesar Rp 1.199.972,00 atau mencapai 325 persen dari Estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 360.000,00.

### *Pajak Rp*

1.199.972,00

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Pamekasan per Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan***(Dalam Rupiah)*

		Anggaran	Realisasi Pendapatan Bruto	Pengembalian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Neto	% Realisasi Anggaran
<b>425122</b>	Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin					
<b>425129</b>	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya					
<b>425131</b>	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	360.000			1.168.972	325
<b>425791</b>	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain					
<b>425811</b>	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah					
<b>425911</b>	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu					
<b>425912</b>	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu					
<b>425913</b>	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu					

**Realisasi****Belanja**

Negara Rp.

5.712.091.729,

00

**Belanja**

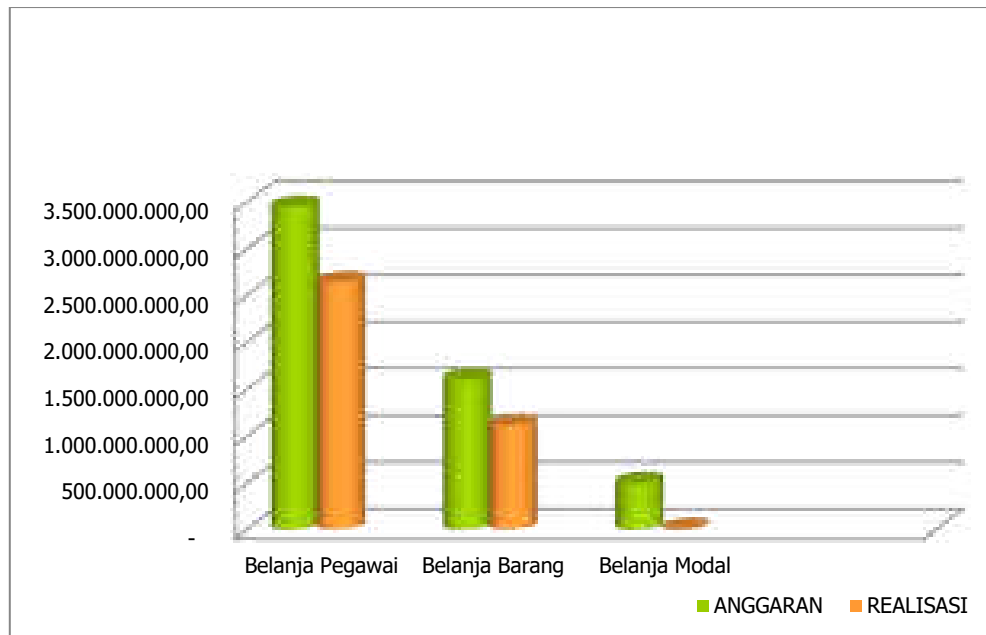
Realisasi Belanja Pengadilan Agama Pamekasan per Semester II Tahun 2023 adalah sebesar Rp 5.712.091.729,00 atau 99 persen dari Anggaran Belanja sebesar Rp 5.761.068.000,00.

Rincian Estimasi Belanja dan Realisasi Belanja Pengadilan Agama Pamekasan per Semester II Tahun 2023 tersaji sebagai berikut:

**Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja***(Dalam Rupiah)*

	Anggaran	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja Neto	% Realisasi Anggaran
<b>Belanja Pegawai</b>	3.446.557.000	3.415.539.413	0	3.415.539.413	99
<b>Belanja Barang</b>	1.623.197.000	1.610.654.572	0	1.610.654.572	99
<b>Belanja Modal</b>	991.314.000	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>5.761.068.000</b>	<b>5.712.091.729</b>	<b>0</b>	<b>5.712.091.729</b>	<b>99</b>

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per Semester II Tahun 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja per Semester II Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 41.307.460,00 atau sebesar 1,11 persen dibandingkan Tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya pagu belanja pegawai yang besar tetapi tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang ada sehingga jumlah realisasi belanja pegawai sedikit lebih kecil daripada tahun lalu.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja per Semester II Tahun 2023 dan Tahunan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja**

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3.415.539.413	3.228.287.868	89.551.520	3,51%
Belanja Barang	1.610.654.572	1.556.423.878	-24.744.060	-2,18%
Belanja Modal	0	23.500.000	-23.500.000	-100,00%
<b>Total Belanja</b>	<b>5.712.091.729</b>	<b>4.808.211.746</b>	<b>41.307.460</b>	<b>1,11%</b>

*Realisasi*

*Belanja*

*Pegawai Rp*

*3.415.539.413*

*,00*

## **B.2 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per Semester II Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.415.539.413,00 dan Rp 3.228.287.868,00 atau terjadi Kenaikan sebesar Rp 89.551.502,00 atau 0,04 persen.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Pegawai per Semester II Tahun 2023 dan Tahunan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai***(Dalam Rupiah)*

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	3.415.539.413	3.228.287.868	89.551.520	3,51%
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0	0,00%
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0	0,00%
Total Belanja Brutto	2.640.861.887	2.551.495.373	89.551.608	3,51%
Pengembalian Belanja	88	185.094	-185.006	-99,95%
Total Belanja Netto	3.415.539.413	3.228.287.868	89.551.520	3,51%

*Realisasi**Belanja**Barang Rp**1.610.654.572**,00***B.3 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per Semester II Tahun 2023 dan Tahunan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.610.654.572,00 dan Rp 1.556.423.878,00. Realisasi Belanja Barang per Semester II Tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp 24.744.060,00 atau (0,02) persen dari Realisasi Belanja Barang per Tahunan 2022. Hal ini disebabkan antara lain adanya peningkatan dalam Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, dan Belanja Pemeliharaan. Perbandingan rincian Realisasi Belanja Barang per Semester II Tahun 2023 dan Tahunan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang***(Dalam Rupiah)*

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	746.295.070	702.589.300	43.705.990	6,22%
Belanja Barang Non Operasional	8.880.000	3.750.000	5.130.000	136,80%
Belanja Jasa	59.300.573	96.418.461	-37.117.888	-38,50%
Belanja Pemeliharaan	256.399.483	297.324.925	-40.925.442	-13,76%
Belanja Perjalanan Dinas	40.993.500	46.650.000	4.463.500	12,32%
Total Belanja Brutto	1.610.654.572	1.556.423.878	-24.744.060	-2,18%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0

*Realisasi**Belanja**Modal Rp 0,00***B.4 Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per Semester II Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 23.500.000,00.

Realisasi Belanja Modal per Semester II Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 23.500.000,00 atau 100,00 persen dari Realisasi Belanja Modal per Tahun 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan pada Belanja Peralatan dan Mesin,

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal per Semester II Tahun 2023 dan Tahunan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran		Kenaikan/(penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00
Pengembalian Belanja	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Netto	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00

*Realisasi*

*Belanja*

*Modal*

*Peralatan dan*

*Mesin Rp 0,00*

#### **B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Semester II Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 23.500.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Semester II Tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp 23.500.000,00 atau 100,00 persen dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan kebutuhan dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin pembelian lap top untuk hakim.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Semester II Tahun 2023 dan Tahunan 2022 tersebut antara lain:

**Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran		Kenaikan/(penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00
Pengembalian Belanja	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Netto	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00

*Realisasi*

*Belanja*

*Modal Gedung*

*dan Bangunan*

*Rp 0,00*

#### **B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Semester II Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan dan penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Tahun 2022.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Semester

II Tahun 2023 dan Tahun 2022 tersebut antara lain:

**Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi Anggaran		Kenaikan/(penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	0,00

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### ASET

#### Aset Lancar

Aset Lancar mencakup Kas dan Setara Kas yang diharapkan untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 327.500,00 dan Rp 309.855,00, terjadi Kenaikan sebesar Rp 33.583.381,00 atau 10,838.42 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Lancar per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

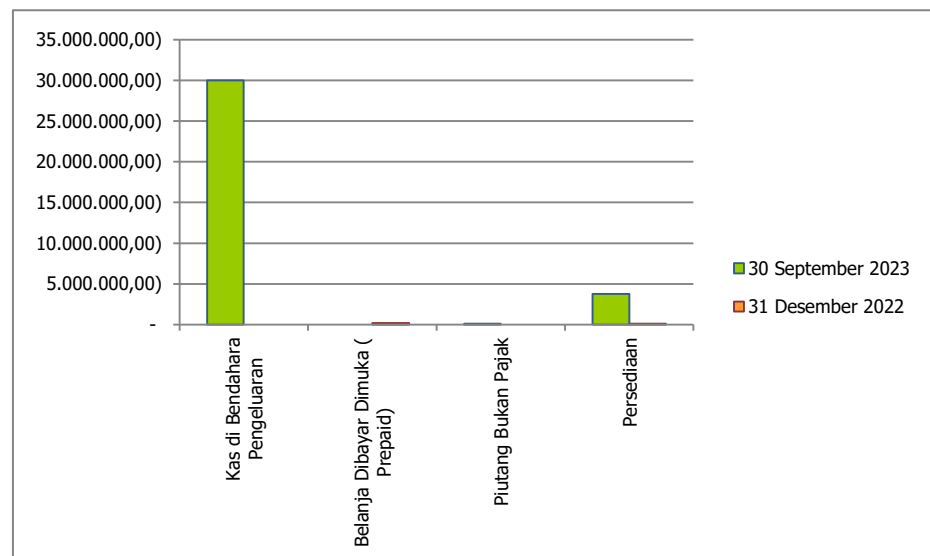
**Tabel 9. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun**

Uraian	TA 2023	TA 2022	(Dalam Rupiah) Kenaikan/Penurunan
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	0	206.055	(206.055)
Piutang Bukan Pajak	0	0	0
Persediaan	327.500	103.800	3.659.599
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>327.500</b>	<b>309.855</b>	<b>33.583.381</b>

Komposisi Aset Lancar per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam grafik dibawah ini :

#### Grafik

#### Komposisi Aset Lancar



*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp 0,00*

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Pamekasan per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 100,00 persen karena adanya uang persediaan yang menjadi kas di tahun anggaran 2023.

*Persediaan Rp  
327.500,00*

### **C.2 Persediaan**

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 327.500,00 dan Rp 103.800,00 terjadi Kenaikan sebesar Rp 3.659.599,00 atau 3,525.60 persen.

Perbandingan rincian saldo Persediaan per Semester II Tahun 2023 dan Tahunan 2022 per akun adalah sebagai berikut :

***Tabel 10. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun***

*(Dalam Rupiah)*

No	Kode Perkiraan	Uraian	30 Desember 2023	31 Desember 2023
1	117111	Barang Konsumsi	327.500	103.800
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
3	117911	Persediaan yang belum diregister	0	0
		Jumlah	327.500	103.800

*Aset Tetap Rp  
6.301.213.428,  
00*

### **Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah



sebesar Rp 6.301.213.428,00 dan Rp 5.628.628.700,00, terjadi Penurunan sebesar Rp (13.313.016,00) atau (0,24) persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap per Semester II Tahun 2023 dan Tahun 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 11. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun**

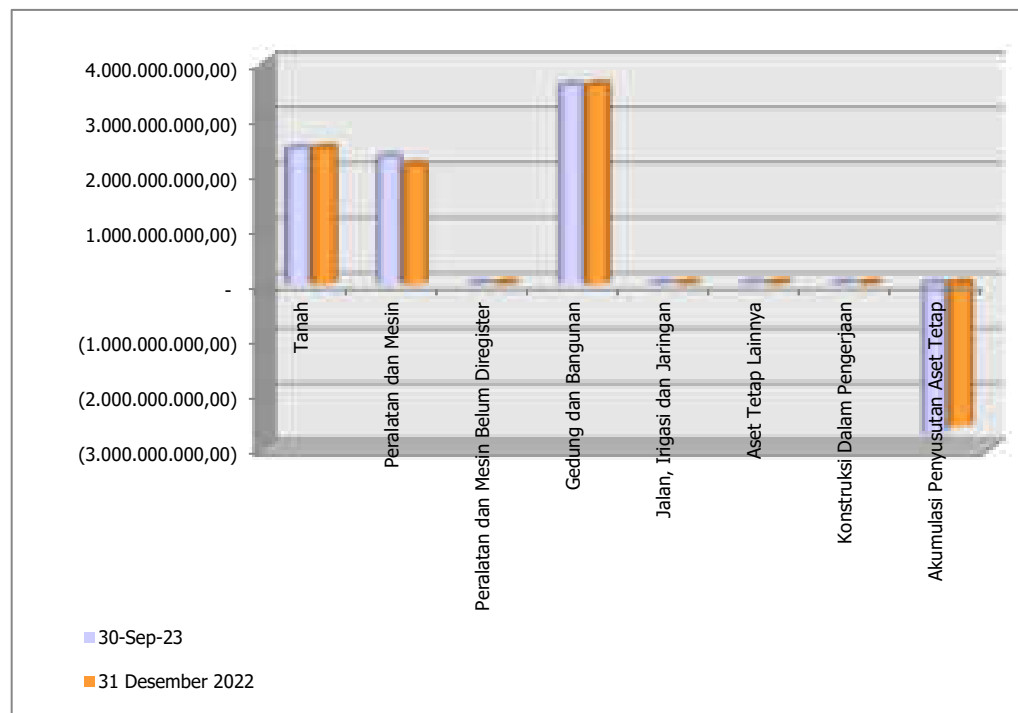
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30-Jun-23	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
1	Tanah	2.447.769.000,00	2.447.769.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	2.295.643.734,00	2.146.243.734,00	149.400.000,00
3	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-
4	Gedung dan Bangunan	3.595.930.000,00	3.595.930.000,00	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	5.704.857,00	5.704.857,00	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>8.345.047.591,00</b>	<b>8.195.647.591,00</b>	<b>149.400.000,00</b>
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.729.731.907,00)	(2.567.018.891,00)	(162.713.016,00)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>5.615.315.684,00</b>	<b>5.628.628.700,00</b>	<b>(13.313.016,00)</b>

Komposisi Aset Tetap per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam grafik dibawah ini :

**Grafik**

**Komposisi Aset Tetap**



Posisi Aset Tetap pada Neraca dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada SIMAKBMN per Semester II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 12. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca SAIBA dan SIMAKBMN**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca SAIBA	Aset Tetap dalam Neraca SIMAKBMN	Selisih
1	Tanah	2.447.769.000,00	2.447.769.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	2.295.643.734,00	2.295.643.734,00	-
3	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-
4	Gedung dan Bangunan	3.595.930.000,00	3.595.930.000,00	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	5.704.857,00	5.704.857,00	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>8.345.047.591,00</b>	<b>8.345.047.591,00</b>	-
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.729.731.907,00)	(2.729.731.907,00)	-
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>5.615.315.684,00</b>	<b>5.615.315.684,00</b>	-

Tanah Rp  
2.447.799.000,  
00

### C.3 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Mahkamah Agung Republik Indonesia di Wilayah Jawa Timur per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.447.799.000,00 dan Rp 2.447.799.000,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan pada aset tanah.

Mutasi transaksi Tanah pada Tahunan Semester II Tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan dan telah disajikan pada CalBMN

Peralatan dan  
Mesin Rp  
2.379.953.734,  
00

### C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.379.953.734,00 dan Rp 2.146.243.734,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 149.400.000,00 atau 6,96 persen. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester II Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan in.

Peralatan dan

### C.5 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

*Mesin Belum Diregister Rp0,00* Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Belum Diregister per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0 persen, terdapat pada :

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester II Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan Bangunan Rp 4.281.827.744,00*

### **C.6 Gedung dan Bangunan**

Saldo Gedung dan Bangunan per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 4.281.827.744,00 dan Rp 4.281.827.744,00, tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan Aset tetap Gedung dan Bnagunan di tahun ini.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester II Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan

*Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00*

### **C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00, tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester II Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan

*Aset Tetap Lainnya Rp 5.704.857,00*

### **C.8 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 5.704.857,00 dan Rp 5.704.857,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Rincian Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester II Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,00*

### **C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan dan penurunan.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran A2 Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi*

### **C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

*Penyusutan Aset Tetap Rp 2.814.041.907,00*

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.814.041.907,00 dan Rp 2.567.018.891,00, terjadi kenaikan sebesar Rp (162.713.016,00) atau 6,34 persen. Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Semester II Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

*(Dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.942.601.802,00	1.845.456.993,00	97.144.809,00
2	Gedung dan Bangunan	787.130.105,00	721.561.898,00	65.568.207,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.729.731.907,00</b>	<b>2.567.018.891,00</b>	<b>162.713.016,00</b>

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Aset Lainnya Rp 0,00*

**Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan Aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap, termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Saldo Aset Lainnya per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Perbandingan rincian saldo Aset Lainnya per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

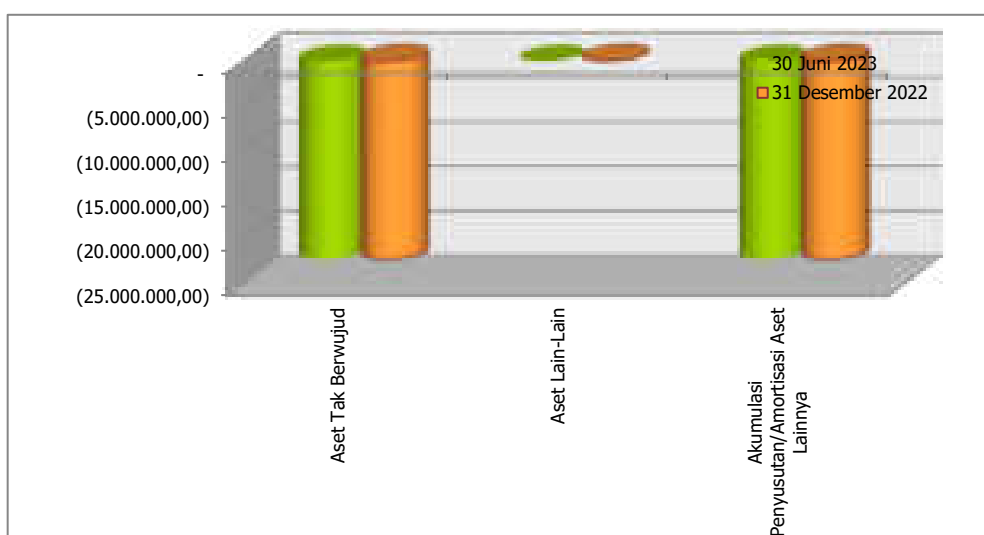
**Tabel 14. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30-Sep-23	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
1	Aset Tak Berwujud	22.200.000,00	22.200.000,00	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	-
3	Akumulasi Penyusutan/Amortasi Aset Lainnya	(22.200.000,00)	(22.200.000,00)	-
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	-	-	-

Komposisi Aset Lainnya per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam grafik dibawah ini :

**Grafik**  
**Komposisi Aset Lainnya**



#### Aset Tak

Berwujud Rp  
22.200.000,00

#### C.16 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa *software* komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dan lisensi.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 22.200.000,00 dan Rp 22.200.000,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Rincian Aset Tak Berwujud, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester II Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

#### Aset Lain-Lain

#### C.17 Aset Lain-Lain

*Rp 0,00* Aset Lain-Lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-lain per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Rincian Aset Lain-lain, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester II Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi* **C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

*Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya* Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Rp (22.200.000,00)* Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp (22.200.000,00) dan Rp (22.200.000,00), terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Kewajiban* **KEWAJIBAN**

*Jangka Pendek* **Kewajiban Jangka Pendek**

*Rp 0,00* Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp 0,00 dan Rp 19.986.012,00, terjadi Kenaikan sebesar Rp 312.042.110,00 atau 1,561.30 persen.

Perbandingan rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

***Tabel 15. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun***

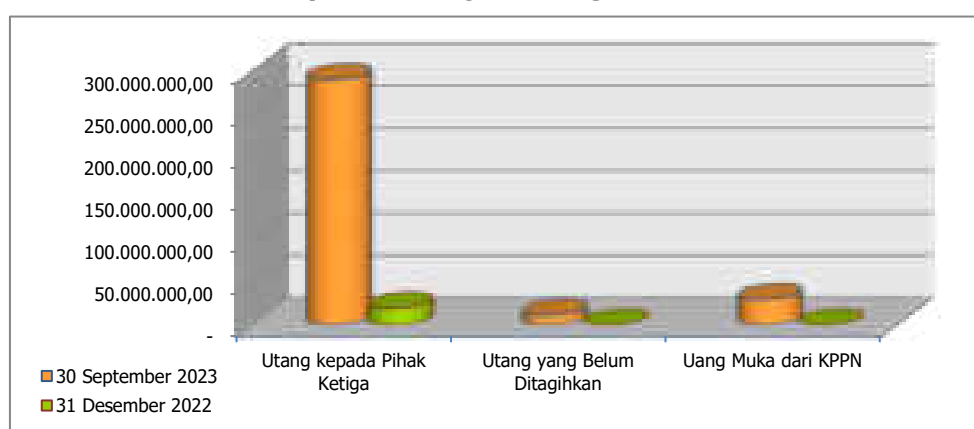
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30-Sep-23	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
1	Utang Kepada Pihak ketiga	290.462.122,00	19.986.012,00	270.476.110,00
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	11.566.000,00	-	11.566.000,00
3	Uang Muka dari KPPN	30.000.000,00	-	30.000.000,00
	<b>Jumlah Kewajiban jangka Pendek</b>	<b>332.028.122,00</b>	<b>19.986.012,00</b>	<b>312.042.110,00</b>

Komposisi Kewajiban Jangka Pendek per Semester II Tahun 2023 dan Tahunan 2022 disajikan dalam grafik dibawah ini :

### Grafik

#### Komposisi Kewajiban Jangka Pendek



Uang Muka dari KPPN Rp 0,00

#### C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00,- atau sebesar 1000 %, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp 6.301.540.928,00

#### EKUITAS

#### C.15 Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas per Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar adalah masing-masing sebesar Rp 6.301.540.928,00 dan Rp 5.608.952.993,00, terjadi Penurunan sebesar Rp(692.588.385,00) atau (5,20) persen.

Pendapatan PNBP Rp

#### D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

#### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

1.168.812,00 Jumlah Pendapatan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.168.812,00 dan Rp 0,00, terjadi Kenaikan sebesar Rp 1.168.812,00.

**Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai**

Rp 3.395.997.413,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.395.997.413,00 dan Rp 3.236.568.868,00. Terjadi Kenaikan sebesar Rp 109.749.114,00 atau 3,999 persen dari tahun 2022.

**Beban D.3 Beban Persediaan**

Persediaan Rp 41.964.382,00 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 41.964.382,00 dan Rp 38.379.850,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 1.822.507,00 atau 6,546 persen.

**Beban Barang dan Jasa D.4 Beban Barang dan Jasa**

dan Jasa Rp 1.120.512.012,00 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.120.512.012,00 dan Rp 1.092.640.549,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 18.256.948,00 atau sebesar 2,235 persen dari tahun 2022.

**Beban D.5 Beban Pemeliharaan**

Pemeliharaan Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan



*Rp* Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.  
*379.068.021,00*

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 379.068.021,00 dan Rp 372604.500,00. Terjadi Penurunan sebesar Rp (33.340.647,00) atau sebesar (11,047) persen dari tahun 2022.

*Beban* **D.6 Beban Perjalanan Dinas**  
*Perjalanan* Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas  
*Dinas Rp* dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.  
*68.648.500,00*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 68.648.500,00 dan Rp 46.650.000,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 7.263.500,00 atau sebesar 20,048 persen dari tahun 2022.

*Beban* **D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
*Penyusutan* Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis  
*dan Amortisasi* atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama  
*Rp* masa manfaat Aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan  
*144.038.016,0* untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.  
*0* Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada  
Semester II Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar  
Rp 144.038.016,00 dan Rp 249.964.726,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp  
39.673.135,00 atau sebesar 38,014 persen dari tahun 2022.

*Beban* **D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**  
*Penyisihan* Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan Beban untuk mencatat estimasi  
*Piutang Tak* ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang  
*Tertagih* Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023 dan  
*Rp0,00* Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

*Kegiatan Non* **D.9 Kegiatan Non Operasional**  
*Operasional Rp* Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban  
*0,00* yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas dan fungsi Mahkamah Agung  
Republik Indonesia.

*Ekuitas Awal* **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
*Rp* **E.1 Ekuitas Awal**

5.608.952.993, Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing  
00 sebesar Rp 5.608.952.993,00 dan Rp 5.556.327,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp  
52.625.160,00 atau sebesar 0,00 persen dari tahun 2022.

*Surplus/Defisit* **E.2 Surplus (Defisit) LO**

*LO (Rp* Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara Surplus/Defisit Kegiatan  
*5.149.059.372,* Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Kejadian Luar Biasa.  
*00)*

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun  
2023 dan 2020 adalah defisit sebesar (Rp 5.149.059.372,00) dan (Rp  
5.036.808.493,00).

*Dampak* **E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan**  
*Kumulatif* **Mendasar**

*Perubahan* Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar  
*Kebijakan* untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023 dan 2020 adalah  
*Akuntansi/Kes* sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.  
*alahan*

*Mendasar*

*Rp0,00*

*Penyesuaian*

*Nilai Aset*

*Rp0,00*

**E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat  
penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023  
dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

*Koreksi Nilai* **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

*Persediaan* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang  
*Rp0,00* diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode  
sebelumnya.

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023  
dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

*Selisih*

*Revaluasi Aset*

**E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan

*Tetap Rp 0,00* penilaian ulang Aset Tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

*Koreksi Nilai*

### **E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

*Aset Non*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Revaluasi Rp*

*0,00*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp 0,00 merupakan pengurangan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi.

*Koreksi Lain-lain Rp 0,00*

### **E.3.6 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

*Transaksi*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

*Antar Entitas*

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rp*

*5.841.647.757,*

*00*

Nilai transaksi Antar Ekuitas untuk periode yang berakhir Semester II Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.841.647.757,00 dan Rp 643.571.261,00. Terjadi Penurunan sebesar Rp (34.251.658,00) atau sebesar 0,00 persen dari tahun 2022.

*Ekuitas Akhir*

### **E.5 Ekuitas Akhir**

*Rp*

*6.301.540.928,*

*00*

Nilai ekuitas pada tanggal Semester II Tahun 2023 dan Tahunan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 6.301.540.928,00 dan Rp 5.717.595.386,00. Terjadi Penurunan sebesar Rp (124.141.819,00) atau sebesar 0,00 persen dari tahun 2022.

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca per Semester II Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Pamekasan.

### **F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI**

Sampai dengan Semester II Tahun 2023 tidak terdapat temuan BPK RI untuk ditindaklanjuti.

### **F.3 Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Pengadilan Agama Pamekasan sampai dengan per Semester II Tahun 2023 sebanyak 3 rekening dengan rincian sebagai berikut:

- |                                   |   |                   |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1. Rekening Bendahara Pengeluaran | : | 2 rekening        |
| 2. Rekening Bendahara Penerimaan  | : | 0 rekening        |
| 3. Rekening Lainnya               | : | <u>1 rekening</u> |
| Jumlah                            | : | 3 rekening        |

### **F.4 Pengungkapan Penting Lain-lain**

Tidak ada pengungkapan penting lain-lain.